

## **PERAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM Mendukung PROGRAM- PROGRAM PEMERINTAH KOTA BONTANG**

**Ramandita Shalfiah<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Fungsi peran PKK adalah sebagai fasilitator dan penyuluh dalam mendukung program-program pemerintah Kota Bontang sudah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa masukan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan PKK untuk mendukung program pemerintah Kota Bontang, tetapi karena berjalannya kegiatan penyuluhan dalam memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam hal pendidikan, ekonomi dan kesehatan dapat membantu meminimalisir masalah tersebut.*

**Kata Kunci :** *PKK, Program Pemerintah, Kota Bontang.*

### **Pendahuluan**

Keputusan pemerintah untuk merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi perempuan di bawah departemen dalam federasi mengakibatkan lahirnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu organisasi yang mewadahi perempuan yang tidak berada di bawah departemen. Organisasi ini bermula dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang berupaya melibatkan partisipasi dan merupakan program pendidikan perempuan. Selanjutnya organisasi ini berubah menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang berupaya tidak hanya mendidik perempuan, melainkan membina dan membangun keluarga di bidang mental spiritual dan fisik material serta peningkatan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Bergulirnya reformasi dan disyahnkannya GBHN 1999 oleh MPR serta adanya paradigma baru pembangunan dan semangat otonomi daerah, maka kepanjangan PKK berubah menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu sebuah organisasi yang melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Semester Akhir Pada Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ditasoleh08@gmail.com

program pemerintah. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan program-program pemerintah.

PKK menjadi gerakan untuk membantu dan mendukung program-program pemerintah dengan mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat. PKK juga harus menembus pemahaman agama yang kurang tepat, tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi termasuk mereka harus memberikan penjelasan yang utuh tentang manfaat program KB kepada masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah, mereka membantu korban kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. PKK *concern* dalam membela kaum miskin yang kelaparan dengan cara membantu ekonomi kaum perempuan. Program kerja PKK berorientasi pada praksis, artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. Dan lebih dari itu, PKK mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa.

Bontang adalah salah satu kota di Kaltim dengan perkembangan cepat. Sama seperti daerah lain yang mengalami pertumbuhan cepat yang mengupayakan pemberdayaan bagi masyarakat, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pemerintahan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengarah pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Hal ini lebih banyak dititikberatkan di Kelurahan yang bekerjasama dengan TP PKK di setiap Kelurahan.

Organisasi PKK lah yang ikut berperan besar dalam pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat. Dengan berbagai peningkatan kegiatan ibu-ibu PKK baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan. Kelompok PKK mendorong pembangunan dan program pemerintah Kota Bontang melalui kelompok-kelompok binaan yang mencapai 32 kelompok pada tahun 2010 dan 15 PKK aktif di Kota Bontang. Selain itu, dalam proses pembangunan tersebut terdapat pula kelompok masyarakat yang turut berpartisipasi berupa LSM yang jumlahnya mencapai 42 pada tahun 2010.

Dari observasi awal yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa kegiatan dalam hal pembangunan masyarakat dan mendukung program pemerintah yang dilakukan oleh TP PKK sampai saat ini sudah cukup baik. TP PKK sudah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang sampai pada unit terkecil masyarakat yaitupada kesejahteraan keluarga dan dalam pemberdayaan masyarakat juga sudah cukup baik. Pada Sumber Daya Manusianya pun sudah cukup baik. Tetapi, dalam kegiatan tersebut ada hal-hal yang menghambat yaitu waktu dan tenaga, fasilitas, dan pemahaman suami tentang Gerakan PKK.

Dilihat dari sisi waktu dan tenaga, ibu-ibu TP PKK umumnya adalah ibu pekerja, entah sebagai PNS, wiraswastawan, karyawan perusahaan dan lain-lain sehingga praktis waktu dan tenaga yang disediakan sangat terbatas. Dengan ketersediaan waktu dan tenaga yang terbatas, maka hasilnya juga sulit untuk mencapai harapan. Dilihat dari fasilitasnya, pada tingkat Kelurahan dirasakan kurangnya fasilitas memadai, karena status kelurahan masih ada yang menyewa, maka kegiatan ibu-ibu PKK menjadi gabung dengan kegiatan kelurahan. Pemahaman suami tentang kegiatan PKK kurang baik, hal ini dikarenakan profesi ibu rumah tangga yang harus mengurus rumah tangga sehingga para suami beranggapan bahwa kegiatan tersebut kurang bermanfaat bagi mereka.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Organisasi***

Sondang Siagian (1997:26) cenderung menelaah organisasi dari sudut pandang yang berbeda yaitu organisasi ditelaah dengan pendekatan structural dan organisasi ditelaah dari sudut pandang keprilakuan. Pendekatan yang sifatnya struktural menyoroiti organisasi sebagai tempat atau wadah, hal ini berarti:

1. organisasi dipandang merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja yang bersifat formal serta tergambar pada “kotak-kotak”, kedudukan dan jabatan yang diduduki oleh orang-orang.
2. organisasi dipandang sebagai rangkaian hierarki kedudukan yang menggambarkan secara jelas garis kewenangan dan tanggung jawab.
3. organisasi dipandang sebagai alat pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan strukturnya bersifat permanen tanpa menutup kemungkinan terjadinya reorganisasi apabila hal itu dipandang perlu baik demi percepatan laju usah pencapaian tujuan maupun dalam usaha peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja.

### ***Peran***

Sedangkan menurut Soekanto (1990:268), Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Menurut Soekanto (2002 : 243) peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

### ***Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)***

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Rakernas VII PKK Tahun 2010 adalah gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

### ***Program***

Menurut Charles O. Jones (1996 : 294), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atausebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanyajuga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapatdiakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996 : 295).

### ***Pemerintahan***

Ramlan Surbakti (1992 : 168) mengatakan istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya. Dimana Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek yaitu:

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara.
- b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan

secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.

- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.

Pemerintahan adalah cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

## **Metode Penelitian**

### ***Fokus Penelitian***

Suyanto & Sutinah (2006:170-171) mengatakan : fokus penelitian harus ditetapkan pada awal penelitian karena focus penelitian berfungsi untuk “memberi batas” hal-hal yang akan diteliti. Fokus penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian utamanya pada saat pengumpulan data yaitu membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian kita. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menentukan fokus penelitian ini yaitu Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Fasilitator dalam mendukung program pemerintah
2. Penyuluh dalam mendukung program pemerintah

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah dekriptif kualitatif. Penelitian ini di maksudkan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan yang terjadi dilapangan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang di peroleh dilapangan, selanjutnya dianalisis dengan pemaparan serta interprestasi secara mendalam. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data model interaktif (*Interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman (2007), yang terdiri dari 4 komponen sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

## **Hasil Penelitian & Pembahasan**

### ***Fasilitator dalam Mendukung Program Pemerintah***

Dalam konteks pembangunan masyarakat (*civil society*) kegiatan fasilitasi dilakukan oleh pengurus PKK Kota Bontang yang bertugas: Pertama, membina kelompok masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi suatu kebersamaan tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan; Kedua, sebagai pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis ketahui bahwa peran PKK sebagai fasilitator untuk masyarakat dalam penghubung dan penggerak belum optimal karena dapat dilihat saja tidak adanya sekretariat PKK di beberapa Kecamatan maupun Kelurahan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berorganisasi. Ini disebabkan karena ada berbagai macam alasan seperti tidak adanya waktu masyarakat untuk ikut melaksanakan kegiatan PKK, tidak adanya imbalan dana dalam setiap kegiatan PKK yang merupakan tidak ada untungnya buat mereka, dan tidak adanya transportasi untuk menuju lokasi pelaksanaan kegiatan PKK. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya peran PKK di dalam keluarga juga kurang optimal, inilah sebab mengapa mereka belum paham akan pentingnya kegiatan berorganisasi khususnya untuk pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang merupakan program yang tidak lepas dari program pemerintah Kota Bontang.

Adapun ketiadaan tempat sekretariat PKK di Kecamatan dikarenakan tidak adanya ruangan yang tersisa di Kecamatan, karena ruangan di Kecamatan rata-rata digunakan untuk kegiatan Kecamatan itu sendiri. Sedangkan di Kelurahan sejauh ini rata-rata sudah memiliki tempat sekretariat PKK untuk kelangsungan kegiatan PKK walaupun kegiatannya masih bersatu di Kelurahan dan Kecamatan tetapi Pengurus PKK berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kegiatan PKK tersebut. Dan ada beberapa kelurahan yang berstatus bangunan menyewa secara otomatis tidak adanya tempat Sekretariat PKK karena untuk kegiatan kelurahan saja sudah kurang optimal dalam menempati ruangan karena terbatasnya ruangan, apalagi dengan keberadaan PKK maka untuk tempat sekretariat PKK di kelurahan yang berstatus menyewa masih bergabung kegiatannya dengan kelurahan serta arsip-arsip PKK yang tidak teratur karena status kelurahan yang masih berpindah-pindah.

Seluruh Pengurus TP PKK Kota Bontang berusaha semaksimal mungkin Pemerintah Kota Bontang untuk menangani masalah keberadaan status bangunan kelurahan yang masih menyewa dan berpindah-pindah, agar terwujudnya kegiatan PKK dan kegiatan Kelurahan yang kondusif dan berjalan lancar serta mengenai kelompok masyarakat sebagai sasaran utama dalam peningkatan pembangunan. Dalam hal ini PKK sebagai fasilitator untuk masyarakat telah bekerja sama dengan semaksimal mungkin untuk membina dan membimbing masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PKK dalam mendukung program-program pemerintah kota Bontang, hanya saja perlunya peningkatan kinerja pengurus PKK dalam menghimpun dan mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan PKK yang merupakan tolak ukur untuk mensejahterakan keluarga.

Sebagai fasilitator dalam mendukung program pemerintah, PKK mempunyai fungsi peran sebagai perencana dan pelaksana. Dalam perencanaan program PKK ini tidak lepas dari 10 Program Pokok yang mengacu pada program-program Pemerintah Kota Bontang yang secara umum adalah pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Pada perencanaannya PKK juga

tidak lepas dari program SKPD terkait program pendidikan, kesehatan dan perekonomian, berikut adalah program-program Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Disperindagkop yang sinkron dengan program PKK.

Dinas Pendidikan, programnya sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Program Pendidikan Non Formal
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas Kesehatan, programnya sebagai berikut:

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2. Program perbaikan gizi masyarakat
3. Program pengembangan lingkungan sehat
4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
5. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
6. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Disperindagkop, programnya sebagai berikut:

1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
2. Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
4. Program peningkatan kelembagaan koperasi dan pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
5. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
6. Program pengembangan industri kecil dan menengah
7. Program peningkatan dan kemampuan teknologi industri
8. Program pelatihan berusaha bagi keluarga miskin

Program-program SKPD diatas merupakan program yang sinkron dengan program PKK, dalam hal ini PKK mempunyai perencanaan program yang mendukung program masing-masing SKPD Kota Bontang yang tertera pada 10 Program Pokok PKK yang hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

PKK sebagai mitra kerja pemerintah mempunyai tugas untuk membantu dan mendukung semua program dan kegiatan Pemerintah, yang

bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan dalam setiap program pembangunan dan apa yang terjadi pada masyarakat, dengan mengedepankan kesejahteraan rakyatnya demi tercapainya keberhasilan program kerja PKK dan juga keberhasilan program pemerintah Kota Bontang secara bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik bersama instansi/dinas/SKPD terkait dalam pelaksanaan program.

### ***Penyuluh Dalam Mendukung Program Pemerintah***

Penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan atau penunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan yaitu suatu proses atau cara yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu. PKK sebagai penyuluh masyarakat dengan memberikan informasi mengenai perkembangan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dengan memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang juga mendukung program-program pemerintah Kota Bontang.

Penyuluhan dalam arti umum berarti ilmu sosial yang mempelajari sistem dan perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyuluhan adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan semua “*stakeholders*”, melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri setiap individu dan masyarakatnya untuk mengelola kegiatan yang semakin produktif dan efisien, demi terwujudnya kehidupan yang baik, dan semakin sejahtera secara berkelanjutan. Penyuluhan pembangunan sebagai proses pemberdayaan masyarakat, memiliki tujuan utama yang tidak terbatas pada terciptanya “*better farming, better business, dan better living*”, tetapi untuk memfasilitasi masyarakat (sasaran) untuk mengadopsi strategi produksi dan pemasaran agar mempercepat terjadinya perubahan-perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi sehingga mereka dapat (dalam jangka panjang) meningkatkan taraf hidup pribadi dan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis ketahui bahwa fungsi peran PKK sebagai penyuluh dalam mendukung program-program pemerintah Kota Bontang sudah cukup baik, yang dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan PKK dalam penyuluhan sudah dilaksanakan secara rutin dengan mengangkat tema sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan mengangkat tema sesuai dengan kondisi daerah dan bekerja sama dengan dinas maupun lembaga-lembaga sosial sebagai nara sumber untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama keluarga.

Penyuluhan dilakukan dengan memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan PKK dengan berpedoman pada 10 Program Pokok PKK dan mendukung program-program

pemerintah kota bontang, terutama dalam kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Dalam penyuluhan ini PKK sebagai penyuluh bertujuan untuk merubah perilaku individu dan masyarakat agar berpikir produktif dan efisien, demi terwujudnya kehidupan yang baik, dan semakin sejahtera secara berkelanjutan. Penyuluhan pembangunan sebagai proses pemberdayaan masyarakat, memiliki tujuan utama yang tidak terbatas pada terciptanya “*better farming, better business, dan better living*”, tetapi untuk memfasilitasi masyarakat sebagai sasaran untuk mengadopsi strategi produksi dan pemasaran agar mempercepat terjadinya perubahan-perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi sehingga mereka dapat (dalam jangka panjang) meningkatkan taraf hidup keluarga dan mensejahterakannya sebagai tolak ukur pembangunan yang merupakan tujuan dari pemerintah.

### **Penutup**

Berdasarkan penelitian di lapangan mengenai Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang, serta penyajian data dan pembahasannya telah diuraikan dalam penelitian ini maka penulis menarik kesimpulan yaitu: pertama, Fasilitator dalam mendukung program pemerintah Kota Bontang belum optimal disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat sepenuhnya dalam berorganisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya PKK dalam keluarga serta kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan PKK untuk mendukung program-program pemerintah Kota Bontang. Kedua, Penyuluh dalam mendukung program pemerintah Kota Bontang sudah berjalan dengan baik, penyuluhan sudah dilaksanakan secara rutin dan kegiatan tersebut bertujuan untuk memotivasi dan menggerakkan keluarga agar peka dengan keadaan yang sedang terjadi. Penyuluhan yang dilakukan PKK Kota Bontang sudah banyak memberikan dukungan untuk pemerintah menjalankan berbagai program baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun perekonomian.

Dari kesimpulan tersebut tersebut di atas penulis memberikan saran-saran yaitu: pertama, Agar pengurus PKK lebih meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan kegiatan PKK terutama dalam menghimpun dan membina keluarga agar masyarakat lebih antusias untuk mengikuti segala kegiatan PKK dalam mendukung program-program pemerintah Kota Bontang. Pemerintah dalam hal ini juga diharapkan agar lebih memperhatikan di setiap kegiatan PKK dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan PKK. Kedua, Perlunya peningkatan kegiatan penyuluhan agar terwujudnya taraf hidup masyarakat kota Bontang yang layak, dengan memberikan informasi penting tentang perkembangan masalah yang sedang terjadi dan memotivasi serta menggerakkan masyarakat agar lebih produktif dan efisien guna untuk kesejahteraan keluarga, dengan dibantu oleh pemerintah melalui dinas-dinas

atau lembaga-lembaga sebagai nara sumber, untuk memberikan solusi dan meningkatkan minat keluarga berpartisipasi dalam pembangunan.

### **Daftar Pustaka**

- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri. 2010. *Hasil Rapat Kerja Nasional VII PKK*. Jakarta: Penerbit Tim Penggerak PKK Pusat
- James L, Gibson dkk. 1985. *Organisasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Miles, Mathew. B dan A. Micheal Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif*. University Indonesia. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo, Jakarta
- Sondang P.Siagian. *Organisasi Kepemimpinan dan perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1992
- Stephen P.Robbins. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan
- Suyanto, Bagong., Sutinah, ed. 2006. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana, Jakarta
- Wolfman, BR, 1989, *Peran Kaum Perempuan : “Bagaimana Menjadi Cakap dan Seimbang dalam Aneka Peran”*, Cetakan Ketiga, Kanisius, Yogyakarta.